

SKRIPSI

WAKAF TANAH DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN



ESTI DARMASTUTI

NIM : 039914839

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

WAKAF TANAH DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,

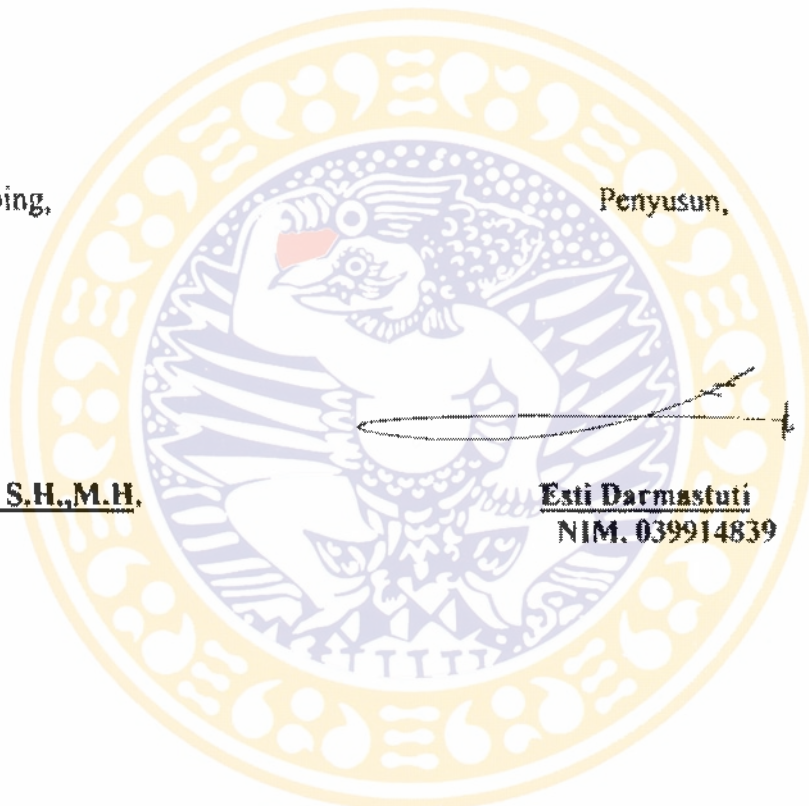


Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
NIP. 131999627

Penyusun,



Esti Darmastuti
NIM. 039914839



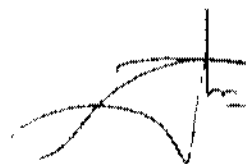
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2004

Panitia Penguji Skripsi :

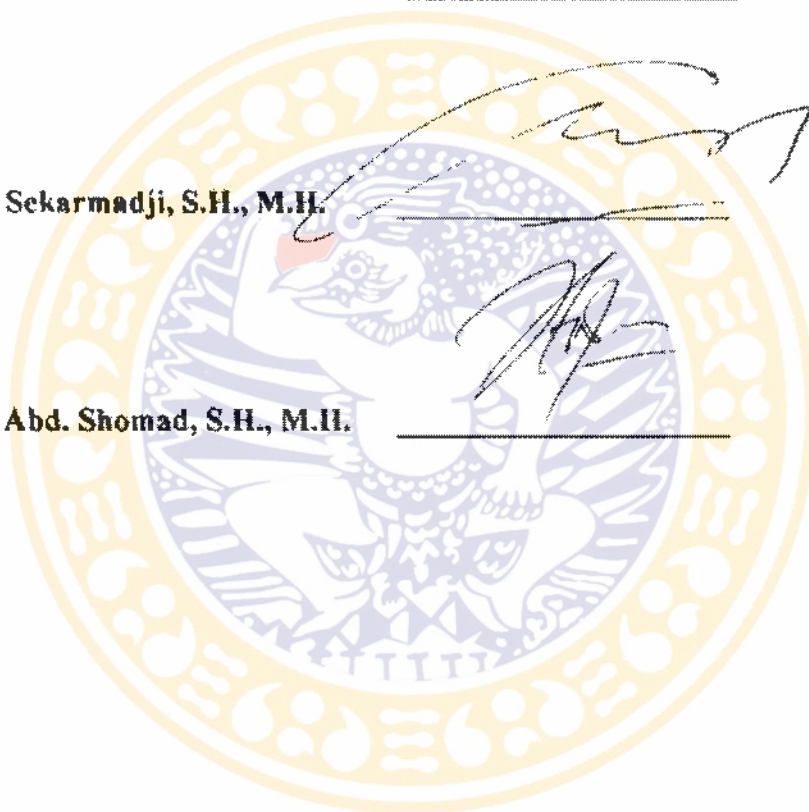
Ketua : M. Sumedi, S.H., M.H.



Anggota : 1. Agus Sekarmadji, S.H., M.H.



2. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP



1. Kesimpulan

- a. Bahwa terhadap wakaf tanah dengan akta di bawah tangan menurut pandangan hukum Islam adalah sah jika telah memenuhi rukun dan syarat wakaf. Sedangkan wakaf tanah dengan akta dibawah tangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memenuhi rukun dan persyaratan wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
- b. Bahwa, terhadap perselisihan wakaf diselesaikan melalui Pengadilan Agama jika menyangkut sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan tanah, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan masalah-masalah lain yang menyangkut masalah wakaf berdasarkan syariat Islam. Jika terhadap harta wakaf itu terdapat pihak yang mempermasalahkan tentang status kepemilikannya, maka menjadi wewenang peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tersebut. Atau dengan kata lain, jika terhadap tanah yang diwakafkan tersebut ternyata menjadi obyek sengketa kepemilikan antara wakif dengan pihak lain - pihak ketiga, maka khusus sengketa kepemilikan itu menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan bukan perselisihan perwakafan, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

2. Saran

- a. Hendaknya pemerintah lebih mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan ini, agar masyarakat lebih mengetahui mengenai tata pelaksanaan maupun tata cara pendaftaran wakaf tanah sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.
- b. Untuk lebih menjamin efektifnya pelaksanaan perwakafan tanah ini diperlukan adanya suatu pengawasan yang ketat. Pada umumnya perwakafan tanah di daerah-daerah ditingkat Kecamatan. Untuk memudahkan pengawasan diperlukan adanya tertib administrasi baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen Agama secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama. (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jo pasal 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978).